

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

2015

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan perjanjian kinerja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2012–2017, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2015, serta Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015.

Perjanjian kinerja tahun 2015 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
1.	Meningkatnya efektivitas birokrasi yang akuntabel;	1.1	Perolehan opini hasil pemeriksaan BPK	WTP	Proses Audit BPK	
		1.2	Perolehan nilai sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	B	CC	
		1.3	Peringkat LPPD pemerintah kabupaten	Tinggi	Tinggi	
		1.4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit pelayanan publik :	a. RSUD	77,00%	63,03%
				b. DISDUKCAPIL	77,00%	76,11%
				c. KPPT	87,00%	75,24%
		1.5	Peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dan APIP lainnya	2%	2%	
		1.6	Peningkatan Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	4%	4%	
1.7	Meningkatnya jumlah Program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD	80%	99,76%			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan perekonomian Masyarakat;	2.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	5,74%	5,69%	
		2.2	Meningkatnya Pendapatan Regional Perkapita	8,58 juta	8,22 juta	
3.	Tersedianya sarana dan prasarana daerah yang memadai	3.1	Peningkatan proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik	0,56%	0,56%	
		3.2	Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum pertahun	94,398 orang	83,508 orang	
		3.3	Peningkatan proporsi jembatan dalam kondisi baik	48%	48%	
		3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65%	65%	
		3.5	Jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)	5 panti	5 panti	
		3.6	Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum	5,32%	4,07%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		3.7	Rasio izin trayek	0.00065%	0.00036%
4.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan peternakan, perikanan, dan kehutanan	4.1	Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Pertahun (Ton)	154.600	147.462
		4.2	Peningkatan Produksi komoditi unggulan daerah: a. Karet Kering (Ton) b. Kelapa Sawit (Ton) c. Kakao (Ton)	16.884,48 59.615,31 230	16.995 33.195 214,5
		4.3	Jumlah produksi perikanan (Ton)	85,12	83,34
5.	Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas	5.1	Persentase penanganan sampah	50%	62%
		5.2	Pemantauan pencemaran status mutu air	25%	25%
		5.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	11,89%	4,35%
		5.4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	65,5%	71%
		5.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	75%	100%
		5.6	Tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> )	73%	85%
6.	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas tenaga kerja	6.1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97%	0,97%
		6.2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (orang)	100	250
		6.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (orang)	208	208
7.	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat;	7.1	Peningkatan angka usia harapan hidup	70,3%	70,3%
		7.2	Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk	0,39%	0,15%
		7.3	Menurunnya angka kematian bayi (orang)	16	21
		7.4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,03%	0,02%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		7.5	Menurunkan persentase balita gizi buruk	0,064%	0,17%
		7.6	Meningkatkan rasio tenaga para medis per satuan penduduk	6,2%	2,27%
8.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	8.1	Peningkatan angka melek huruf	96,63%	98,62%
		8.2	Angka rata-rata lama sekolah	9,00%	8,52%
		8.3	<b>Angka partisipasi kasar (%):</b>		
			a. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	112,24	111,02
			b. Angka Partispasi Kasar (APK) SMP/MTs	99,51	105,11
			c. Angka Partispasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	96,27	94,10
		8.4	<b>Angka Partisipasi Murni (%):</b>		
			a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,90	92,02
			b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79,25	71,72
			c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	79,83	62,58
		8.5	<b>Angka Putus Sekolah (%):</b>		
			a. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,053	0,02
			b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,037	0,03
			c. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,31	0,15
		8.6	<b>Angka pendidikan yang ditamatkan (%)</b>		
			a. Tamat SD dan SLTP	100	67
			b. Tamat SLTA keatas	88,95	36

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>		<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
9.	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai amanat MOU Helsinki	9.1	Cakupan penegakan Dinul Islam	21%	25%
		9.2	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Aceh Barat	55%	55%
		9.3	Cakupan pembedayaan sarana dan prasarana keagamaan	40%	35%
		9.4	Tersalurnya zakat infaq dan shadaqah (ZIS)	16,351 orang	16,351 orang
		9.5	Cakupan pembinaan tenaga keagamaan	40%	40%
10.	Meningkatkannya peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan	10.1	Jumlah grup kesenian/kebudayaan	2%	1,32%
		10.2	Jumlah organisasi/ormas	55 ormas	11 ormas
		10.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	15,3%	70,18%
		10.4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	30%	29,82%
11.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan gender	11.1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	43,24%	43,29

Jumlah Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.251.480.209.153,87 (Satu triliyun dua ratus lima puluh satu milyar empat ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh tiga koma delapan puluh tujuh rupiah).